

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Terdahulu

Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* antara *Stakeholders* yang terkait dalam program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Maka dari itu peneliti membutuhkan kerangka teori yang akan digunakan pada penelitian ini untuk dijadikan acuan.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian peneliti terdahulu bertujuan sebagai acuan dasar dalam penyusunan penelitian dan bahan perbandingan dengan tujuan untuk mengetahui hasil penelitian yang sejenis oleh peneliti terdahulu untuk menjadi gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian saat ini. Maka dalam kajian Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu guna mendukung penelitian peneliti, seperti :

1) Hasil penelitian Ferdiansyah Wicaksono dan R Hari Busthomi (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah Wicaksono dan R Hari Busthomi (2020). Dengan judul penelitian yaitu “***Collaborative Governance dalam Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat di Kota Bandung***”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kolaboratif kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan, terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan fasilitas ekonomi dan kreativitas inklusif. Melalui tata kelola kolaboratif, itu hadir sebagai

forum untuk saling interaksi antara para pelaku kebijakan dalam membangun komitmen dan kerja sama melalui peran mereka sehingga tujuan positif masing masing pihak tercapai. Dalam hal ini ditegaskan melalui pola “ABCGM” yang menghubungkan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media, dan masyarakat sebagai landasan dalam membangun sinergi sehingga pola ini memberikan kondisi yang menggambarkan peran masing-masing antar aktor dan pelakunya. kewenangan bahkan hambatan antar aktor dalam membangun kerjasama. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa antar-institusi yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan perlu disertai dengan komitmen sebagai proses berkelanjutan membangun kepercayaan sehingga tindakan kolaboratif mampu mengakomodasi kepentingan dan tujuan semua pihak dan secara inklusif dirasakan oleh semua pihak.

2) Hasil penelitian Handoko Dwi Susantyo, Ermaya Suradinata, dan Megandaru W Kawuryan (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Handoko Dwi Susantyo, Ermaya Suradinata, dan Megandaru W Kawuryan (2022). Dengan judul penelitian yaitu “***Collaborative Governance dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan***”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan kewirausahaan terpadu, apa saja faktor penghambat dan pendukung *collaborative governance* dalam pengembangan kewirausahaan terpadu dan strategi apa yang digunakan untuk mendukung *collaborative governance* dalam pengembangan kewirausahaan terpadu. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan

induktif. Penelitian dalam memperoleh informan menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan kewirausahaan terpadu dilaksanakan dengan aktor Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Pelaksana Perindustrian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, Satuan Pelaksana Sosial, Bank DKI. Terdapat factor penghambat yaitu *indikator governance, sharing of information* dan *trust among participant*. Berdasarkan fakta penghambat tersebut disusun strategi dengan penyusunan *standart operational procedure* dalam setiap tahapan program, adanya monitoring dan evaluasi bersama serta edukasi kepada masyarakat untuk merubah paradigma dalam pemberdayaan ekonomi.

3) Hasil penelitian Wahyu Hidayah (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat (2022). Dengan judul penelitian yaitu “***Collaborative Governance dalam Pengembangan Digitalisasi UMKN Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Wilayah Bangka Belitung***”. Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang bagi bidang ekonomi khususnya pada sektor UMKM untuk bertransformasi menjadi UMKM yang berbasis teknologi informasi atau digitalisasi UMKM. Namun keterampilan dan kemampuan Masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk *go digital*. Permasalahan inilah yang kemudian membuat pemerintah harus bersinergi dan berkolaborasi agar pelaku UMKM dapat terlibat pasar digital sekaligus untuk menghadapi revolusi industry 4.0. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan *stakeholder* lainnya dalam meningkatkan keterlibatan pelaku UMKM dalam pasar digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber

data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam mendorong perkembangan digitalisasi UMKM di wilayah Bangka Belitung secara umum sudah berjalan dengan maksimal. Namun meski demikian masih terdapat kendala yaitu, kurangnya kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam menggunakan internet terlebih bagi kelompok para pelaku UMKM yang usinya sudah tua. Rekomendasi bagi pemerintah untuk terus menguatkan literasi digital kepada Masyarakat agar perkembangan teknologi mampu dimanfaatkan oleh Masyarakat terutama dalam digitalisasi UMKM menghadapi *Revolusi Industry 4.0*.

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti Terdahulu | Judul Penelitian | Teori Terdahulu | Teori Peneliti | Persamaan/Perbedaan |
|----|---|---|--------------------------|------------------------|---|
| 1. | Ferdyansyah Wicaksono dan R Hari Busthomi | <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat di Kota Bandung. | - | Anshel and Gash (2007) | Persamaannya dimana judul sama-sama mengarah mengenai <i>Collaborative Governance</i> dimana pendekatannya sama-sama menggunakan kualitatif. Adapun persamaan mengenai penggunaan teori tetapi peneliti dengan peneliti terdahulu memiliki perbedaan dalam lokasi penelitian dan juga objek penelitian. |
| 2. | Handoko Dwi Susantyo | <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi | Teori oleh De Seve, 2007 | | |

| No | Nama Peneliti Terdahulu | Judul Penelitian | Teori Terdahulu | Teori Peneliti | Persamaan/Perbedaan |
|----|-------------------------|--|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| | | Jakarta Selatan. | | | |
| 3. | Wahyu Hidayat | <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Digitalisasi UMKN Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Wilayah Bangka Belitung | Teori oleh Anshell and Gash, 2007 | | |

Sumber : Hasil Peneliti, 2024

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat dikatakan bahwa perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berbeda pada beberapa aspek, mulai objek penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu berbeda. Dan pada penelitian ini peneliti menggunakan Teori *Collaborative Governance* dari Anshell and Gash (2007). Dan objek penelitian yang digunakan di Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam program *Co-Working Space*. Dengan penelitian terdahulu yang relevan maka akan menjadi acuan bagi peneliti untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2.1.2 Kajian Administrasi

Menurut Irra Chisyanti Dewi (2011: 3) dalam buku pengantar administrasi mengatakan bahwa “administrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan” yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah mengadakan, mengirim, menyimpan.

Menurut Siagian (2004:2) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie (1993) bahwa Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Ordway Tead dikutip oleh Anggara (2012) mengemukakan bahwa :

"Adminstrasi dapat dipahami sebagai kegiatan yang diperlukan dari individu-individu (eksekutif) dalam sebuah organisasi yang melakukan tugas memesan, meneruskan dan memfasilitasi upaya terkait dari sekelompok individu yang disatukan untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ditentukan."

Berdasarkan uraian para ahli diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa administrasi merupakan suatu proses kerja sama antara kelompok secara Bersamasama untuk mencapai tujuan secara efesian dan efektif.

Administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, 15 dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas adalah semua proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

2.1.3 Kajian Administrasi Publik

Administrasi Publik terdiri dari dua suku kata yaitu "Administrasi" dan Publik".

Menurut Caiden (1982) Administrasi Publik adalah fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan Kerjasama dengan DPR dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan perubahan organisasi, pengerahan dan

pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain yang dijalankan oleh Lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

Menurut Chandler dan Plano (2008 : 3) dalam bukunya Deddy Mulyadi administrasi publik mengemukakan bahwa proses dimana sumber daya dan personal publik pada diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, meimplementasikan dan mengelola Keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Nicholas dalam Harbani Pasalong (2010 : 8) menyatakan bahwa :

“Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan prakteknya, yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.”

Menurut Woodrow Wilson (2012 : 21) dalam buku Wirman Syafri Administrasi Publik adalah urusan atau praktek urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuatu dengan selera dan keinginan rakyatnya.

Gordon, (2006:25), menjelaskan bahwa :

“Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan”

Pfiffner dan Presthus dikutip Pamudji (1985) mengemukakan administrasi negara atau administrasi publik dengan pengertian sebagai berikut :

"Administrasi Negara merupakan proses implementasi kebijakan Pemerintah yang telah direncanakan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi Negara dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan kelompok individu melalui koordinasi untuk melakukan tugas pemerintahan sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah."

Menurut Nigro dan Nigro dalam Maksudi & Irawan, (2017: 223-224) Administrasi Publik adalah:

- 1) Administrasi publik merupakan usaha kerjasama kelompok dalam suatu susunan atau lingkungan pemerintahan.
- 2) Administrasi publik mencakup ketiga cabang pemerintah berupa eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan dari ketiga badan tersebut.
- 3) Administrasi publik mempunyai peranan penting di dalam perumusan kebijakan umum/negara dan oleh karena itu merupakan bagian dari proses politik.
- 4) Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat (swasta).
- 5) Administrasi publik mempunyai hubungan erat dengan berbagai elemen masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang dimana diberikannya pelayanan kepada rakyat.

Mengenai beberapa penjelasan definisi menurut para ahli yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses kegiatan bekerjasama untuk mengelola dan mengatur negara agar dapat tercapainya tujuan. Selain itu, dapat diartikan bahwa administrasi publik yaitu suatu fenomena sosial yang hidup di dalam kehidupan bermasyarakat. Didalam tingkat kehidupan itu individu memiliki peranan penting karena sebenarnya publik adalah bentuk kehidupan antar individu dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap individu mempunyai fungsi sebagai sumber daya publik, sekaligus sumber daya administrasi.

2.1.4 Kajian Organisasi

Menurut Mathis and Jackson (2011: 15) dalam buku Erni Rernawan :

“Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan.”

Menurut Yoseph Kingsbury dan Robert Wilcox (2007: 53-54) dalam buku Ig. Wursanto. Organisasi adalah sebagai proses pembagian tugas atau pekerjaan, mengatur pegawai-pegawai untuk memikul tugas atau pekerjaan dari suatu badan usaha.

Menurut Thoha (200;204) organisasi merupakan kumpulan dari orang – orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini bersifat umum, artinya suatu tujuan yang semua orang didalamnya sepakat baik terpaksa ataupun sadar untuk mencapainya. Adapun tujuan yang bersifat khusus itu merupakan tujuan individu masing-masing.

Menurut Akdon (2006: 43) secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dan melaksanakan kegiatan dengan sesuai dengan peranan tersebut bersama-sama secara terpadu mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Kajian organisasi tidak hanya pada kumpulan orang-orang, aktivitas-aktivitas mereka dan tujuan yang akan dicapai, tapi juga semua aspek yang mempengaruhi eksistensi, perkembangan dan efektivitas organisasi tersebut, antara lain: rincian dan susunan tugas, barang dan mesin, teknologi, informasi dan sumber-sumber lain yang digunakan serta saling berpengaruh dan keterpaduannya dalam suatu sistem.

Definisi lain yaitu organisasi suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Shafritz dan Russel, 1997: 201) dalam Keban (2008: 127). Dalam pengertian ini organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang dikelompokkan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokan orang-orang tersebut berdasarkan kepada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggung jawab dan otoritas tertentu. Wujud pengelompokan tersebut dapat diamati dari suatu struktur dan hirarki. Karena itu menyusun suatu struktur sering diidentikan dengan membuat desain organisasi.

Menurut para ahli yang sesuai dengan penjelasan diatas menyimpulkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi untuk melakukan tugasnya masing-masing untuk mencapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya.

2.1.5 Konsep *Governance*

Konsep *governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik ini di dorong untuk menghadirkan suatu tata Kelola pemerintahan yang berpihak pada kepentingan Masyarakat. *Governance* sebagai kata ganti dari “*Government*”, pemahaman ini sangat umum ditemukan akan tetapi perlu memahami bahwa “*governance*” bukanlah sinonim dari “*government*”. Istilah “*Governance*” artinya pemerintahan yaitu “*the act, fact, manner of governing*” yang artinya tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah. *Governance* sebagai paradigma baru bagi pengelolaan organisasi pemerintahan. Terdapat tiga pilar *governance*, yaitu pemerintahan, swasta, dan Masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan adanya pergeseran paradigma dari *government* ke *governance*, yang menekankan pada kolaborasi yang setara dan simbbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil maka dari itu munculnya perspektif atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik artinya *good governance*.

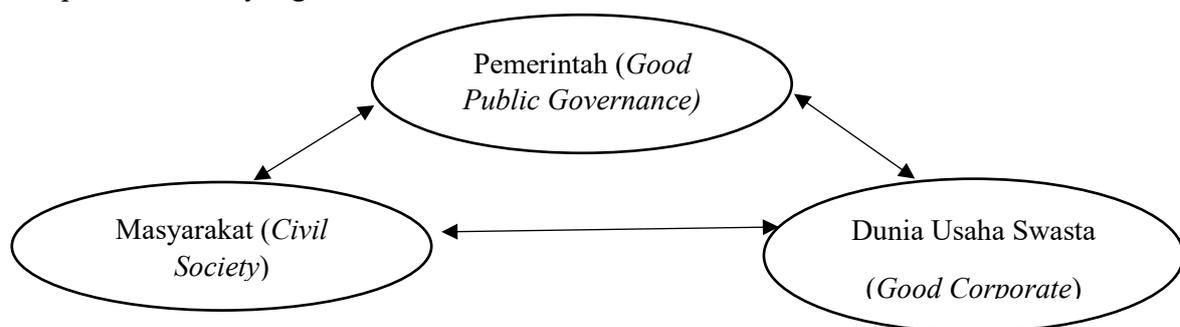
Menurut Dedy Mulyadi pada bukunya studi kebijakan public dan pelayanan public (2018:130) “*Governance* merupakan seluruh rangkaian proses dimana pembuatan keputusan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu di implementasikan atau tidak di implementasikan.”

Sedangkan menurut Retno Sunu Astuti, dkk dalam bukunya *Collaborative Governance* dalam perspektif Administrasi Publik (2020:32) menyatakan bahwa : “*Governance* secara

umum dapat dipahami bentuk peralihan dalam “penyelenggaraan kebijakan public” yang tidak hanya pada berpusat pada pemerintah, namun melibatkan actor lain untuk turut berpartisipasi baik dari Masyarakat, swasta, dan lainnya”. Sedangkan menurut Iwan Satibi pada bukunya Manajemen Publik dalam perspektif teoritik dan empiric (2012:156), mengatakan bahwa *governance* :

“Tiga unsur itulan (*government, private sector, dan civil society*) yang menjadi komponen pelaku dalam negara, untuk menciptakan suatu sinergi sehingga tercipta suatu kesejahteraan dalam masyarakat. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri mewadahi interaksi sosial politik dan partisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.”

Terdapat beberapa pendapat para ahli bahwa *governance* atau tata kelola pemerintah yang baik dalam mewujudkannya dapat dilaksanakan apabila terjadi keseimbangan peran pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, ketiganya mempunyai peran masing-masing. Dari tiga unsur tersebut memainkan perannya sehingga sesuai dengan nilai dan prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik.



Gambar 2.1 Tiga Pilar dalam aktor tata pemerintahan yang baik

2.1.6 Good Governance

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo (2009) Good Governance diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Menurut Agoes (2013) mengartikan Good Governance sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik.

Menurut Mardiasmo (2018 : 23) yang dikutip oleh World Bank mengungkapkan bahwa Good governance adalah :

“Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.”

Sedangkan menurut Leny Nofianti (2015 : 52) yang dikutip oleh Soepomo (2000 : 143) mengungkapkan bahwa Good governance adalah :

“Pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Untuk mewujudkannya jalan yang ditempuh seperti memberantas KKN dan memperbaiki kinerja pemerintah.”

Dari beberapa definisi diatas Rizal Djalil (2014 : 395) juga menyatakan bahwa Good government governance diartikan sebagai berikut yaitu :

“Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih pada suatu organisasi yang dituntut oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya serta dapat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Maka dapat peneliti simpulkan dari definisi diatas bahwa Good government governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan

berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

2.1.7 Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan langkah tatanan pemerintahan yang didalamnya terdapat keterlibatan semua pihak antara *government*, *civil society*, dan *private sector* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egalitarianisme dan demokrasi yang melahirkan tata pemerintahan yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan publik dibutuhkan untuk mewujudkan *good governance*.

Menurut Dwiyanto dalam kerjasaman kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki wewenang dalam mengelola organisasinya walaupun mereka patuh dan tunduk atas kesepakatan bersama.

Menurut La Ode Syaiful Islamy H. dalam bukunya *Collaborative Governance* dalam konsep dan aplikasi (2018:4-5) bahwa :

“*Collaborative Governance* merupakan model keseimbangan kekuatan dan sumberdaya antar pemerintah, para pemangku kepentingan dan lembaga publik lainnya dengan komitmen pemberdayaan bagi pemangku kepentingan yang lebih lemah sehingga mereka saling bergantung satu sama lain dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan Keputusan kolektif dan implementasi berorientasi consensus.”

Menurut James Agbodzakey (2011:3) dalam buku La Ode Syaiful Islamy H. *Collaborative Governance* dalam konsep dan aplikasi bahwa “*Collaborative Governance* mendorong pemecahan masalah secara kolektif dengan melibatkan pemangku kepentingan utama dan alternatif bagi manajemen *top-down*, pembuatann kebijakan dan implementasi.”

Agranoff dan McGuire dalam uraian Chang (2009:76-77) mendefinisikan secara khusus, bahwa :

“*Collaborative Governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi sukarela dan hubungan horisontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik.”

Berbeda halnya dengan definisi *Collaborative Governance* yang dijelaskan Lemos & Agrawal (2006:297) mendefinisikan, bahwa :

“*Collaborative Governance* tidak hanya terbatas pada *stakeholders* yang terdiri dari pemerintah dan bukan pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya *multipartner governance* yang meliputi berbagai sektor baik *sector private* maupun swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran *stakeholder* dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privatsosial.”

Collaborative Governance merupakan bentuk baru dari *governance* yang muncul sebagai strategi baru dalam memerintah dengan mengikut sertakan *stakeholders* seperti aktor swasta atau privat dan aktor pemerintah tetap menjadi aktor final dalam pengambilan keputusan (Ansell, 2007).

Lebih lanjut dijelaskan oleh (Ansell dan Gash, 2007) mendefinisikan *Collaborative Governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik.

Proses *Collaborative Governance* idealnya dilakukan bersama semua *stakeholders* yang ada dalam pengambilan keputusan. Seperti yang dikatakan oleh (Emerson, 2001) mengatakan bahwa :

“Proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan *managemen* yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintah, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dilakukan satu pihak.”

Bentuk model pemerintahan kolaboratif menurut (Ansell dan Gash, 2007) memiliki manfaat yang dapat digunakan bagi pembuatan kebijakan dan 16 praktis. Model kolaborasi ini akan memberikan penjelasan terhadap langkah-langkah pemerintah melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* yang ada, tentang bagaimana pemerintah memperoleh sebuah kebijakan.

Berdasar pada pengertian para ahli diatas memberi gambaran bahwa *Collaborative Governance* adalah sebuah proses yang memiliki suatu peraturan tertentu yang dilaksanakan bersama serta berinteraksi untuk saling menguntungkan antar *stakeholders* yang terlibat. Kolaborasi juga dapat muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terlibat antar *stakeholders* dalam mengatasi isu-isu yang bersumber dari publik. Melalui perspektif *Collaborative Governance* tersebut, tujuan-tujuan positif yang dikehendaki oleh masing-masing *stakeholders* akan dapat tercapai.

Selanjutnya menurut Ansell and Gash (2007:228) menjelaskan terdapat 5 (lima) indikator dari proses terbentuknya *Collaborative Governance* yang terjalin oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, antara lain:

1) *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Pada tahap dialog tatap muka para *stakeholders* yang terlibat diharapkan dapat membangun sebuah kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap prosrs dari sebuah kolaborasi akan yang direncanakan dan dilaksanakan (Ansell and Gash, 2007:558). Adanya dialog tatap muka merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi tanpa adanya dialog tatap muka pada awal proses kolaborasi ditakutkan akan dapat memunculkan sebuah gejolak dalam proses berjalannya suatu kolaborasi.

2) *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi, karena dalam sebuah kolaborasi bukan hanya terkait tawar-menawar, namun juga menyangkut tentang pembangunan sebuah kepercayaan pada masing-masing stakeholders yang terlibat. Kepercayaan tidak akan langsung hadir begitu saja, namun membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kepercayaan akan sangat berguna dalam jangka panjang pada proses kolaborasi.

3) *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses)

Tahapan terhadap proses mengembangkan sebuah keyakinan bahwa perundingan adalah sebuah cara terbaik dalam mendapatkan sebuah kebijakan yang diinginkan dalam pemecahan suatu persoalan yang dihadapi. Komitmen dalam prakteknya membutuhkan suatu tahapan yang jelas, adil dan transparan dari masing-masing aktor yang terlibat.

4) *Shared Understanding* (saling memahami)

Stakeholders dalam sebuah proses kolaboratif pada suatu titik tertentu membutuhkan pengembangan terhadap suatu proses pada pemahaman bersama dari apa yang dicapai secara kolektif. Pemahaman bersama juga didefinisikan sebagai proses penyamaan pemahaman terkait suatu pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi suatu persoalan yang dihadapi.

5) *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai)

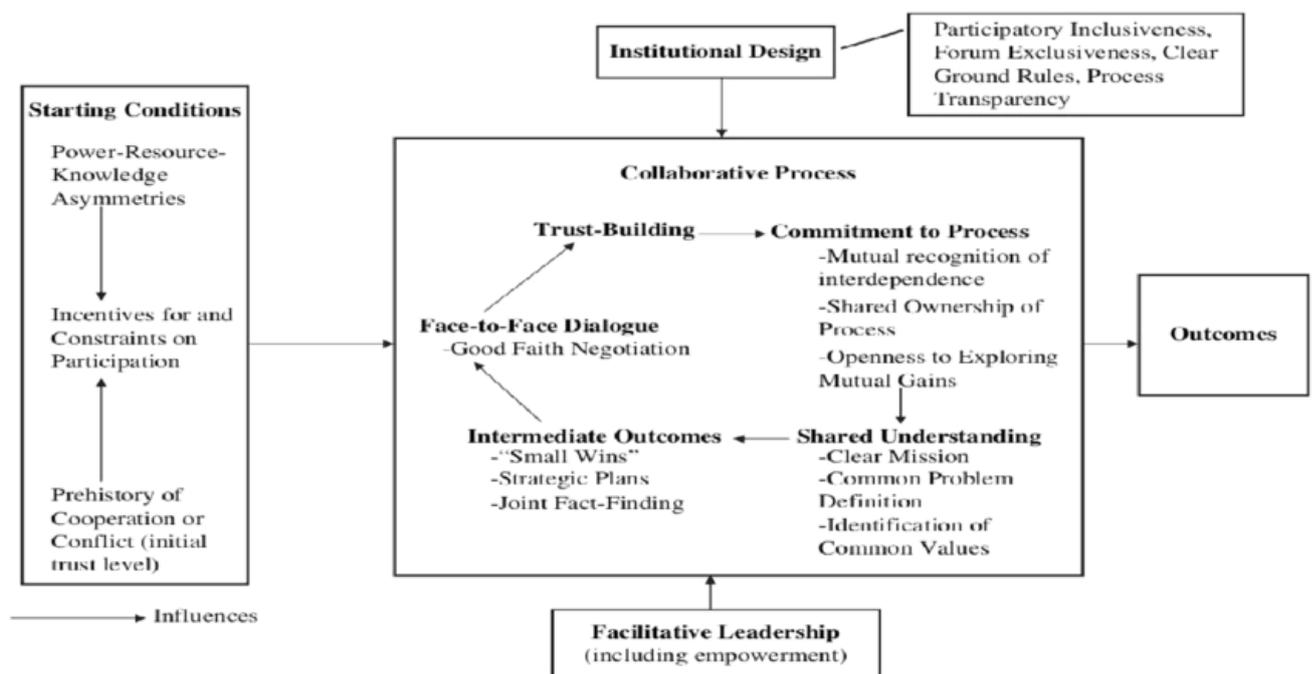
Pada tahap ini diharapkan dapat muncul sebuah kesepakatan terhadap hasil akhir yang ingin dicapai dalam satu kolaborasi, perencanaan dan penyetusan sebuah hasil akhir diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan serta komitmen

untuk dapat menjalankan tupoksi pada masing-masing *stakeholders* guna menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

2.1.8 Model *Collaborative Governance*

Untuk mengilustrasikan interdependensi tersebut, *collaborative governance* yaitu gaya yang berupaya menyederhanakan kompleksitas penggabungan antar pemerintah, *stakeholder*, swasta dan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama yang berorientasi konsensus. Berikut ini model-model *collaborative governance* menurut para ahli dalam buku La Ode Islamy H. *Collaborative Governance* dalam konsep dan aplikasi (2018:12-5) :

1) Model Ansell and Gash (2008)



Gambar 2.2 Model *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash (2008)

Model ini memiliki empat variabel besar yang kondisi awal, desain, kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif. Masing-masing variabel luas ini dapat dipilah menjadi variabel yang lebih halus. Variabel proses kolaboratif diperlakukan sebagai inti dari

model kami, dengan kondisi awal, desain kelembagaan, dan variabel kepemimpinan direpresentasikan sebagai kontribusi penting atau konteks untuk proses kolaboratif. Kondisi awal mengatur tingkat dasar kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang menjadi sumber daya atau kewajiban selama kolaborasi terjadi. Kepemimpinan menyediakan mediasi dan fasilitasi penting untuk proses kolaboratif. Dan proses kolaboratif itu sendiri sangat berulang dan nonlinier, dan dengan demikian, kami mempresentasikannya (dengan penyederhanaan yang cukup besar) sebagai sebuah siklus.

Ansell and Gash merumuskan model *collaborative governance* tersebut digambarkan dalam 4 variabel utama, yaitu :

1) Kondisi Awal

Pada tahap kondisi awal dalam perhubungan antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menciptakan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. Ada 3 variabel yang merangkul permasalahan kondisi awal yaitu adanya ketidak seimbangan sumber daya dan pengetahuan antar pelaku kolaborasi, harus ada insentif yang jelas dalam kolaborasi dan adanya ketakutan akan terjadinya konflik jika kolaborasi dilaksanakan.

2) Desain Kelembagaan

Ansell and Gash mendeskripsikan bahwa Desain Institusional mengacu pada partisipasi forum kolaborasi, protocol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan yaitu legitimasi procedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan yaitu pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

3) Kepemimpinan Fasilitatif

Secara luas dapat dilihat sebagai unsur terpenting dalam membawa semua pihak aktor kolaborasi ke meja perundingan untuk mengarahkan *stakeholder* melakukan perundingan dan negoisasi guna mencegah permasalahan yang mungkin akan terjadinya dalam proses kolaborasi.

4) Proses Kolaboratif

Proses kolaborasi sebagai perkembangan tahapan kolaborasi. Ansell and Gash mendeskripsikan 3 tahapan proses kolaborasi antara lain penentuan permasalahan, penentuan tujuan dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut :

- a. Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*)
- b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*) antar peserta kolaborasi
- c. Membangun komitmen terhadap proses kolaborasi (*Commitment to Process*)
- d. *Share Understanding*, sebagai berbagi pemahaman tentang misi dan permasalahan yang dihadapi, serta mengenali nilai-nilai umum dalam kolaborasi
- e. Hasil Sementara, dengan melihat bagaimana meraih kesuksesan awal, melakukan perencanaan stratejik dan penemuan fakta secara bersama.

2) Model Agranoff and Mc. Guire (2003)

Agranoff and Mc. Guire melihat dari 2 variabel adalah aktivitas dan strategi, dari 2 variabel kemudian dikembangkan menjadi 6 gaya kolaborasi yaitu :

- a. *Jurisdiction based*
- b. *Abstinence*
- c. *Top down*

d. *Donor recipient*

e. *Reactive*

f. *Contented*

3) Model Buttler-Colleman

Buttler *and* Colleman mengajukan model kolaborasi berdasarkan variabel level interaksi dan variabel ukuran kelompok. Berdasarkan 2 variabel tersebut menghasilkan 5 gaya kolaborasi yaitu *library, solicitation, tim, community, dan proses support*.

4) Model Weber et al (2005)

Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Gaffney mengemukakan kolaborasi dapat berhasil apabila ditekankan integrasi dan fungsi. Integrasi ini meliputi fungsi lintas arena kebijakan, birokrasi dan level pemerintahan dan warga ikut terlibat. Masyarakat dan organisasi bukan terlibat dalam pemecahan masalah dan implementasinya (weber et al., 2005).

Ada 3 dimensi yaitu dimensi vertical, dimesi horizontal dan dimensi hubungan kemitraan. Dimensi vertikal menggambarkan hubungan antara lembaga pemerintah dengan lembaga lain, Masyarakat dan non-pemerintah dalam hubungan *top-down*. Dimensi horizontal menggambarkan hubungan antara organisasi yang setara dan dimensi kemitraan digambarkan sebagai kombinasi dari dimensi vertical dan horizontal untuk menghasilkan pengaturan yang efektif.

Dalam model *collaborative governance* dari beberapa para ahli tersebut dapat dijadikan acuan atau pedoman pelaksanaan *collaborative governance* tersebut akan mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kolaborasi yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah pada *Collaborative Governance* dengan masing-masing alat ukur yang telah ditentukan yang menjadi kerangka utama. Dengan kata lain bahwa dalam menyusun sebuah kerangka berpikir sesungguhnya diarahkan untuk dapat menjawab secara rasional atas perumusan masalah yang telah dirumuskan. Kerangka berpikir adalah alur ukur peneliti sebagai dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian yang peneliti ambil.

Kerangka berpikir guna untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* dalam Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur.

Collaborative Governance menurut Ansell and Gash (2007:550) yang menggunakan lima dimensi proses *Collaborative Governance*, yaitu :

1) *Face to Face Dialogue* (dialog tatap muka)

Pada tahap dialog tatap muka para *stakeholders* yang terlibat diharapkan dapat membangun sebuah kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap prosrs dari sebuah kolaborasi akan yang direncanakan dan dilaksanakan (Ansell and Gash, 2007:558). Adanya dialog tatap muka merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi tanpa adanya dialog tatap muka pada awal proses kolaborasi ditakutkan akan dapat memunculkan sebuah gejala dalam proses berjalannya suatu kolaborasi.

2) *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi, karena dalam sebuah kolaborasi bukan hanya terkait tawar-menawar, namun juga menyangkut tentang pembangunan sebuah kepercayaan pada masing-masing *stakeholders* yang terlibat. Kepercayaan tidak akan langsung hadir begitu saja, namun

membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kepercayaan akan sangat berguna dalam jangka panjang pada proses kolaborasi.

3) *Commitment to Process* (komitmen terhadap proses)

Tahapan terhadap proses mengembangkan sebuah keyakinan bahwa perundingan adalah sebuah cara terbaik dalam mendapatkan sebuah kebijakan yang diinginkan dalam pemecahan suatu persoalan yang dihadapi. Komitmen dalam prakteknya membutuhkan suatu tahapan yang jelas, adil dan transparan dari masing-masing aktor yang terlibat.

4) *Share Understanding* (kesepahaman bersama)

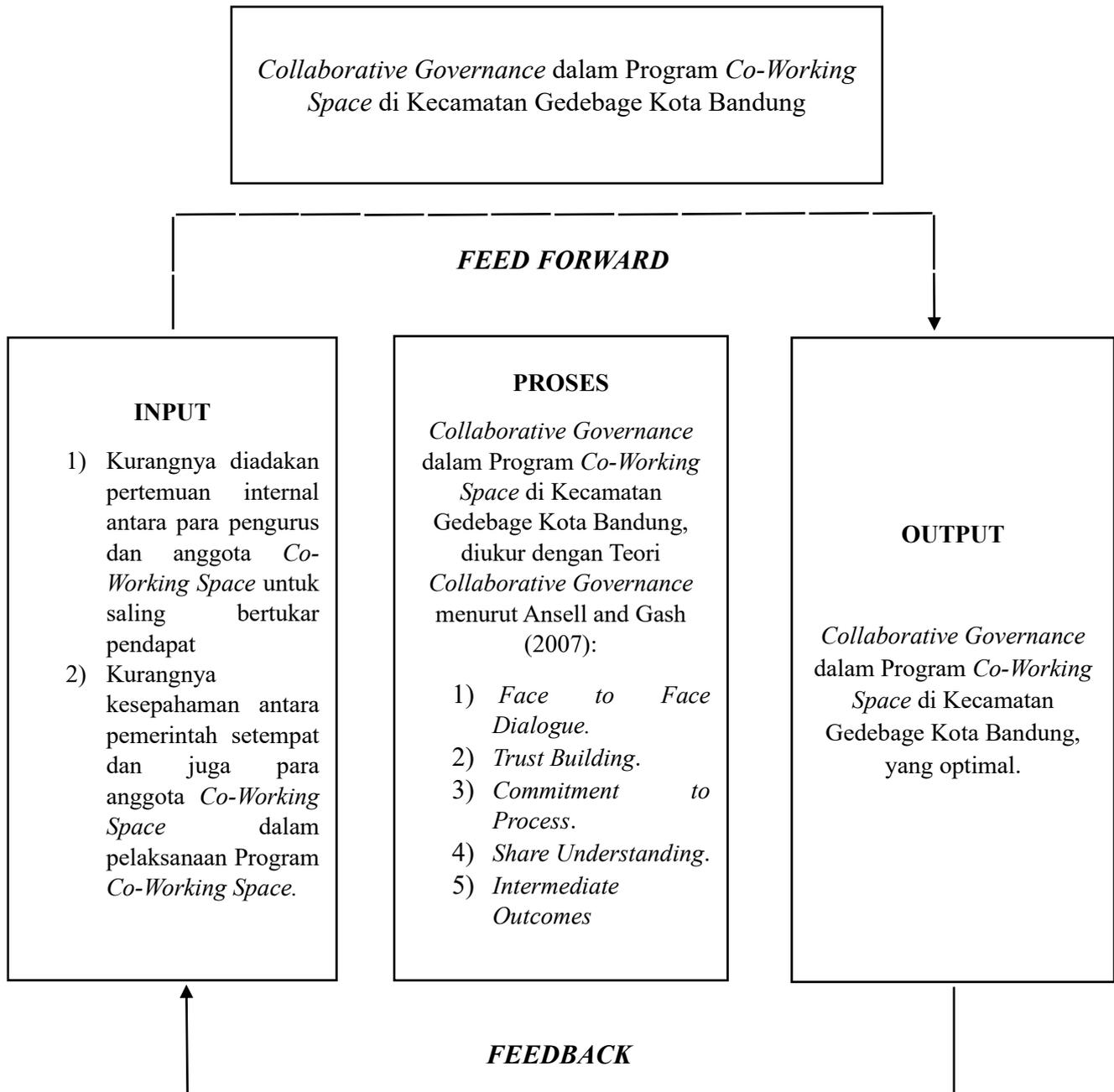
Stakeholders dalam sebuah proses kolaboratif pada suatu titik tertentu membutuhkan pengembangan terhadap suatu proses pada pemahaman bersama dari apa yang dicapai secara kolektif. Pemahaman bersama juga didefinisikan sebagai proses penyamaan pemahaman terkait suatu pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi suatu persoalan yang dihadapi.

5) *Intermediate Outcomes* (hasil sementara)

Pada tahap ini diharapkan dapat muncul sebuah kesepakatan terhadap hasil akhir yang ingin dicapai dalam satu kolaborasi, perencanaan dan penyetusan sebuah hasil akhir diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan serta komitmen untuk dapat menjalankan tupoksi pada masing-masing *stakeholders* guna menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

Teori *Collaborative Governance* dari Ansell and Gash (2007:550) dipilih karena dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan Program *Co-Working Space* di Kecamatan

Gedebage Kota Bandung. Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran, masukan, dan rekomendasi kepada stakeholder yang terlibat untuk lebih meningkatkan peran masing-masing dalam pelaksanaan. Selanjutnya peneliti menyampaikan melalui gambar kerangka pemikiran di bawah ini.



Gambar 2.3 Kerangka berpikir

2.3 Proposisi

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dimana teori *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash (2007:550) yang menggunakan lima dimensi proses *Collaborative Governance*, yaitu (1) *Face to Face Dialogue* (dialog tatap muka), (2) *Trust Building* (membangun kepercayaan), (3) *Commitment to Process* (komitmen terhadap proses), (4) *Share Understanding* (kesepahaman bersama), (5) *Intermediate Outcomes* (hasil sementara).

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan rumusan masalah, peneliti memfokuskan *Collaborative Governance* dalam Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung sebagai berikut :

- 1) *Collaborative Governance* dalam Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung sedang berjalan namun belum efektif.
- 2) Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam *Collaborative Governance* dalam Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
- 3) Adanya solusi yang dapat dilakukan agar *Collaborative Governance* dapat berjalan secara optimal.